

Management Of Financing In Improving Facilities and Infrastructure

Sulkarnain¹, Syamsuddin²

¹ Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
Email: shulkar9@gmail.com

²Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari
Email: syamsuddinjufry@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the management of financing in improving facilities and infrastructure. This research includes the sources of funding owned, the allocation of the education budget in improving facilities and infrastructure, and the absorption or use of the budget in improving facilities and infrastructure. This type of research is qualitative and uses a case study approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used by the researcher is based on the theory of Miles and Huberman, namely, data collection, data reduction, data display, and verification and drawing conclusions. The validity of the data used triangulation methods, namely technical triangulation and source. The results of this study indicate that: the source of funds comes from the government in the form of Islamic Boarding School Operational Assistance funds obtained through the proposals made. Then sourced from the parents of the boarding students called Islamic Boarding School Compulsory Alms. All budget allocations come from the RAPB that has been prepared, which includes planning, procurement, and elimination of facilities and infrastructure. Budget absorption in the Islamic School if there is a process of using the budget.

Kata Kunci: Education Financing Management, Facilities and Infrastructure

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Sulkarnain¹, Syamsuddin²

¹ Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
Email: shulkar9@gmail.com

²Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari
Email: syamsuddinjufry@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pembiayaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana, penelitian ini meliputi sumber pendanaan yang dimiliki, pengalokasian anggaran pendidikan dalam meningkatkan sarana dan prasarana, dan serapan atau penggunaan anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana. Jenis penelitian ini kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berdasarkan teori Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi yakni triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; sumber pendanaan yang dimiliki bersumber dari pemerintah pusat berupa dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) yang didapatkan melalui proposal yang dibuat, selanjutnya bersumber dari orang tua santri yang mondok yang di sebut Sedekah Wajib Pesantren (SWP); Pengalokasian anggarannya semua berasal dari RAPB yang telah dirumuskan dan disusun, yang didalamnya terdapat perencanaan, pengadaan, serta penghapusan sarana dan prasarana; Serapan anggaran atau proses penggunaan anggaran terdapat pemeliharaan sarana dan prasarana, penginventarisasian sarana dan prasarana serta pelaporan penggunaan anggaran.

Kata Kunci: **Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, Sarana dan Prasarana**

Pendahuluan

Dapat kita pahami bahwa pesantren juga merupakan bagian dari satuan pendidikan dapat berjalan dan berfungsi dengan baik apabila memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana/biaya, dan sarana prasarana yang memadai. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa ada 8 ruang lingkup standar yang telah ditetapkan pemerintah untuk dijadikan acuan oleh satuan lembaga pendidikan dalam pengelolaan lembaga, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Peraturan Pemerintah RI No. 19, 2005). Begitu pula dengan rumusan kelompok standar media pendidikan dan pendidikan Standarisasi, sarana pendidikan merupakan sarana untuk menunjang proses pengajaran, artinya sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pengajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, teratur dan efektif dan secara efisien mencapai tujuan Pendidikan (Daryanto dan Mohammad Farid, 2013). Dari uraian diatas Edward Sallis menyatakan bahwa suatu langkah yang perlu dijalankan untuk menghadapi perluasan dalam hal memenuhi kebutuhan atau tuntutan pendidikan saat ini dan masa yang akan datang adalah dengan menerapkan pengelolaan pembiayaan yang baik dalam lembaga pendidikan tersebut (Edward Sallis, 2010).

Terkait pengelolaan pembiayaan, Dedy Kurniady dalam jurnalnya berjudul pengelolaan pembiayaan, menyatakan bahwasannya Pemerintah dalam membiayai pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, belum memiliki dasar yang kuat, Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan untuk dapat mendukung proses pendidikan, belum dipahami secara jelas, Besaran biaya dalam menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, belum dapat diperhitungkan secara tepat, Efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan, yang dilihat dari ketercapaian target dibandingkan dengan besarnya dana yang dialokasikan, belum jelas ukurannya, dan model pengelolaan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, belum tersedia.(Dedy Achmad Kurniady, 2011) Berdasarkan pernyataan ini, persoalan pembiayaan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan agar pendidikan dapat menjadi sebuah wadah

untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Tidak optimalnya sebuah lembaga pendidikan karena tidak dikelola dengan baik pembiayaan pendidikan yang akhirnya berdampak pada sarana dan prasarana, oleh karena itu, tahapan pada pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan dikarenakan pada dasarnya tujuan pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan (Usman, 2017).

Dari hasil observasi peneliti di salah satu lembaga yang ada di Kabupaten Bone yakni Pondok Pesantren Al-Ma'arif Bilae, bahwa pengelolaan pembiayaan yang dilakukan oleh pimpinan pondok ini yakni dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pembiayaan diantaranya adalah transparansi, efisiensi, dan efektivitas sehingga dengan menjunjung tinggi prinsip pembiayaan ini maka dapat menciptakan pengelolaan pembiayaan yang dapat meningkatkan sarana prasarana pendidikan. Selain itu, pada perencanaan pengelolaan dana, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren juga harus diperhatikan betul sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik maka dapat menjadikan pondok ini bisa lebih maju dari pondok-pondok dasar lain yang sudah lama berdiri. Perencanaan yang dapat diterapkan saat pelaksanaan anggaran membuktikan bahwa pimpinan pondok sangat memikirkan dan merumuskan hal tersebut dengan meminimalisir kesalahan atau kekurangan biaya untuk kebutuhan madrasah. Peneliti juga dikuatkan oleh beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Pendidikan yang layak tidak terlepas dari pembiayaan. Biaya merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan (Moh Sugandi, 2019), biaya/dana juga merupakan salah satu faktor utama dalam aspek pendidikan karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan suatu pendidikan, dikarenakan biaya/dana adalah salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Indah Maharani dan Hade Afriansyah, 2019), mengingat pentingnya pembiayaan maka diperlukan pengelolaan yang baik sehingga akan berdampak pada pemenuhan sarana dan prasarana, mengingat sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dikatakan oleh Nusi bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu penunjang proses pembelajaran, dalam ruang lingkup sarana dan prasarana terdapat perencanaan, pengadaan, penginventarisasian dan perawatan

dan semua itu membutuhkan biaya (Nusi Nurstalis, 2021). Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin menganalisis tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan sarana dan prasarana.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut (I Made Laut Mertha Jaya, 2020). Pendekatan studi kasus dimaksudkan dalam penelitian ini yakni mengkaji suatu kasus tertentu yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif (Anak Agung Putu Agung Dan Anik Yuesti, 2019). Dalam pendekatan studi kasus memerlukan riset dan kegiatan lapangan secara mendalam, karena serangkaian aktifitas ini berhubungan dengan teknik pengumpulan data dengan cara melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan february hingga maret 2022 di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'arif Bilae. Untuk menganalisis kasus yang terjadi maka kehadiran peneliti dilapangan mutlak diperlukan, sebab peneliti merupakan instrumen utama dan sekaligus berperan sebagai pengumpul data tunggal karena itulah dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (key instrument). Sumber data atau keterangan yang dapat diperoleh oleh peneliti bersumber dari keterangan pimpinan pondok pesantren, Tenaga kependidikan yang membidangi sarana dan prasarana, tenaga pengajar dan penasehat pondok pesantren. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berdasarkan teori Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi dan penarikan kesimpulan (Husnu Abadi, 2020). Keabsahan data menggunakan metode triangulasi yakni triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil Penelitian

Pondok Pesantren Modern Al-Ma'arif Bilae yang berlokasi di Bilae Kecamatan Awampone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pondok ini merupakan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Ma'arif sejak 1 Januari 2018 meski sebelumnya sudah beroperasi.

Pondok ini memiliki sarana dan prasarana yang bisa memadai bahkan menyamakan dengan sekolah/madrasah lain yang sudah lama berdiri. Maka hal itulah yang membuat peneliti tertarik dengan melakukan penelitian di pondok ini tentang Pengelolaan pembiayaan yang seperti apa yang digunakan oleh Pimpinan Pondok sehingga dapat meningkatkan sarana dan prasarana di pondok tersebut.

A. Sumber pendanaan yang dimiliki pondok pesantren modern al-ma'arif bilae

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa sumber pendanaan pendidikan yang ada di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae terbagi menjadi dua, yang pertama berasal dari pemerintah pusat dengan istilah Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dengan besaran biaya yang diterima dalam satu tahun pelajaran sekali sebanyak Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan yang kedua bersumber dari santri yang mondok dengan istilah Sedekah Wajib Pesantren (SWP) yang diterima dalam satu kali sebulan dengan besaran biaya yang diterima sebanyak Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Data ini didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan pondok dan bendahara pondok serta dokumen yang diperlihatkan bendahara pondok ke peneliti.

Dari data temuan peneliti dapat dipahami bahwa dana atau biaya dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan. Biaya Pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (disekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan (disekolah) tidak akan berjalan (Dedi Supriadi, 2003). Menurut Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat (1), yaitu "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/ atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.(Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, n.d.) dan juga didalam Pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, n.d.). Hal ini juga disebutkan oleh Sulistiyorini bahwa

secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Pemerintah: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya (2) Orang Tua Siswa (peserta didik), (3) Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat (Sulistiyorini, 2009), sumber dana juga bisa berasal dari alumni, dari Kegiatan yang diselenggarakan dan Dana dari usaha/kewirausahaan yang dilakukan

B. Pengalokasian anggaran pendidikan sarana dan prasarana di pondok pesantren Al-Ma'arif Bilae

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan bahwa dalam pengalokasian anggaran pendidikan dalam meningkatkan sarana dan prasarana terdapat beberapa hal, diantaranya:

B1. Perencanaan dan penyusunan anggaran

Hasil temuan peneliti, perencanaan pengelolaan dana yang ada di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae yakni perencanaan anggaran dilakukan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB), dimana RAPB ini dilakukan setiap awal tahun ajaran baru dalam bentuk pertemuan (rapat). Penyusunan anggaran (RAPB) di pondok pesantren modern Al-Ma'arif Bilae tertuang didalamnya segala sumber pemasukan, penggunaannya serta kebutuhan dan keperluan pesantren selama 1 tahun kedepan. Dalam proses keuangannya harus sesuai dengan RAPB yang ada. Kemudian dalam proses pengeluaran dan pemasukan harus sepengetahuan pimpinan pondok dan bendahara yang ada dan itu telah di lakukan secara berkesinambungan agar tercipta keuangan yang sehat di pondok pesantren tersebut.

B2. Perencanaan Sarana dan Prasarana

Hasil temuan peneliti, yang telah dilakukan di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan sarana dan prasarana hal yang paling utama di lakukan pihak pesantren adalah dengan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan melalui pencatatan dan membuat proposal kemudian mengajukannya dan itu terus menerus di lakukan di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'arif Bilae.

B3. Penghapusan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dilakukan, di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae bahwasannya apabila barang berada dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan atau diperbaiki lagi, perbaikannya akan menelan biaya yang besar sehingga

merupakan pemborosan dana, barang-barang kelebihan yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan kegunaannya secara teknis dan ekonomis tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Apabila barang tersebut sesuai dengan kriteria diatas maka akan dicatat dan dibuatkan laporan untuk dilakukan yang namanya penghapusan.

Berdasarkan temuan peneliti diatas dapat peneliti uraikan bahwasannya pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat penting guna terwujudnya sebuah pesantren yang dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Dalam jurnal Ferdi W.P tentang Pembiayaan Pendidikan mengutip buku Sulistyoningrum, Nining. 2010 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Lebih lanjut, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) bahan atau peralatan Pendidikan habis pakai; dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.(Ferd W.P, 2013)

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa keterkaitan antara pembiayaan pendidikan dengan sarana dan prasarana yakni dalam perencanaan pengelolaan dana, pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan pertanggung jawaban yang mana tujuan dari tahap-tahap pada pengelolaan pembiayaan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, sehingga dengan terkelolanya pembiayaan pendidikan dapat meningkatkan saran dan prasarana yang ada di pesantren.

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Berdasarkan hal tersebut diperkuat oleh Mulyono dalam bukunya yang berjudul Konsep Pembiayaan Pendidikan. Dimana Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji

guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervises pendidikan (Mulyono, 2016). Perencanaan merupakan seperangkat keputusan yang diambil dalam menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang.

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam buku berjudul manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang ditulis oleh Dr. H. Rusydi Ananda M.Pd, tertuang didalamnya bahwa pengadaan sarana dan prasarana pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Dalam pengadaann ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhaislan pelaksanaan proses pembelajaran (Rusydi Ananda, 2017).

Penghapusan sarana dan prasarana tentunya harus melihat kondisi barang tersebut dan terkadang mempunyai rentan waktu relative terhadap usia pakai. Berdasarkan hal tersebut, ini selaras dengan pendapat hartati sukirman dimana menurutnya penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Hartati Sukirman, 2010).

C. Serapan anggaran di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan bahwa dalam penggunaan anggaran terdapat beberapa hal, diantaranya:

C1. Proses Serapan/penggunaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran pendidikan semestinya sesuai dengan rencana dan penyusunan anggaran yang sudah direncanakan dan tersusun sesuai dengan RAPB. Hal ini Berdasarkan hasil temuan peneliti di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae menunjukkan bahwa penggunaan anggaran harus sesuai dengan yang tercantum dalam RAPB, dan pengendalian atas penggunaan anggaran yang ada dipondok pesantren modern al-ma'arif bilae yakni pimpinan pondok bersama bendahara, agar pelaksanaan anggaran pendidikan ini

terkendali dengan baik, maka diperlukan pengendalian untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

C2. Pemeliharaan sarana dan prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan selalu siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil temuan peneliti dilakukan dipondok pesantren modern al-ma'arif bilae menunjukkan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana dipondok pesantren modern al-ma'arif bilae dilaukan setiap saat dengan melibatkan SDM yang ada dikarenakan sarana dan prasarana merupakan hal penting bagi lembaga pendidikan, karna sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang paling urgen dalam sebuah lembaga pendidikan yang sangat membantu proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan.

C3. Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil temuan peneliti di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae tentang penginventarisasian menunjukkan bahwa administrasi barang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan mempermudah dalam pemeliharaan serta pengawasan terhadap sarana dan prasarana bahkan untuk perencanaan pengadaan dan pemeliharaan barang sudah ada data yang bisa di informasikan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat peneliti mengutarakan bahwa pelaksanaan anggaran pendidikan semestinya sesuai dengan rencana dan penyusunan anggaran yang sudah direncanakan dan tersusun sesuai dengan RAPB. Hal ini berdasarkan hasil temuan peneliti di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae menunjukkan bahwa penggunaan anggaran harus sesuai dengan yang tercantum dalam RAPB, dan pengendalian atas penggunaan anggaran yang ada yakni pimpinan pondok bersama bendahara, agar pelaksanaan anggaran pendidikan ini terkendali dengan baik, maka diperlukan pengendalian untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan selalu siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil temuan peneliti dilakukan dipondok

pesantren modern al-ma'arif bilae menunjukkan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana dipondok pesantren modern al-ma'arif bilae dilakukan setiap saat dengan melibatkan SDM yang ada dikarenakan sarana dan prasarana merupakan hal penting bagi lembaga pendidikan, karna sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang paling urgen dalam sebuah lembaga pendidikan yang sangat membantu proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Hal tersebut diperkuat pula oleh pernyataan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. (Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2007).

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini berdasarkan hasil temuan peneliti di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae tentang penginventarisasian menunjukan bahwa administrasi barang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan mempermudah dalam pemeliharaan serta pengawasan terhadap sarana dan prasarana bahkan untuk perencanaan pengadaan dan pemeliharaan barang sudah ada data yang bisa di informasikan. Hal ini selaras dengan pendapat martin dan nurhayati bahwa inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap keuangan pesantren untuk mengetahui tingkat keberhasilan keuangan sekolah sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan penelitian di pondok pesantren modern alma'arif bilae peneliti dapat menunjukkan bahwa semua sumber pendanaan yang didapatkan akan di laporkan dalam bentuk pelaporan yang telah tentukan. Untuk pelaporan yang bersumber dari SWP akan dilaporkan dalam bentuk pertemuan dengan stakeholder (pihak pesantren dan santri) yang dilakukan tiap semester dan akhir tahun pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar bendaharawan dapat melaksanakan dengan benar, sah dan efisien dalam menerima, menyimpan, dan menggunakan

keuangan pesantren. Dan untuk pelaporan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat berupa dana BOP akan dilaporkan sesuai dengan atauran dan juknis yang telah ditentukan. Dalam pelaporannya terkadang dilakukan pemeriksaan langsung dari pihak pemerintah terkait dengan pembukuan dan penyimpanan uang tunai serta tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dana. Berdasarkan pernyataan diatas, Cormark dalam Mulyasa mengatakan pertanggungjawaban sebagai auditing. Auditing merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak (E. Mulyasa, 2011). Dapat di simpulkan bahwa peneliti menemukan data terkait dengan pengalokasian anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae, berupa perencanaan dan penyusunan anggaran, perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, serta penghapusan sarana dan prasarana.

Pembahasan

A. Sumber Pendanaan Pendidikan

Pondok pesantren sebagai suatu Lembaga Pendidikan maka sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan. Dalam menjalankan proses manajemen pembiayaan pondok pesantren menggunakan system. Dalam hal ini system yang dimaksud bagaimana unsur-unsur yang ada dalam pondok pesantren saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen pembiayaan operasional pesantren merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan pesantren untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren, sistem pembiayaan pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang sangat menentukan dalam pelaksanaan proses pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan (Zusba Muctar, 2016).

Menurut peneliti terkait sumber pendanaan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dana yang dimiliki diantaranya jenis pendapatan dari usaha dalam Pondok Pesantren yang bersifat profit oriented terdiri dari koperasi santri, pertokoan,

pertenakan, pertanian, perkebunan dan perikanan. Jenis pendapatan bersifat non profit oriented seperti iuran wali santri, bantuan donator, wakaf dan sodaqoh (Nurhadi Mulyani A, 2005). Juga setidaknya sumber dana pondok pesantren yang berasal dari partisipasi masyarakat antara lain: Dewan pendidikan, Komite sekolah, Persatuan orang tua siswa, Perkumpulan olah raga, Perkumpulan kesenian, Organisasi-organisasi lain (K.A. Rahman, 2012). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, telah diamanatkan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari partisipasi masyarakat/orang tua siswa (Muhajirin, 2012)

B. Pengalokasian Anggaran dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Manajemen keuangan pondok pesantren memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan (budgeting), tahap pelaksanaan (Akunting) dan tahap penilaian atau evaluasi (Auditing). Ketiga tahapan tersebut harus dilakukan dalam pengelolaan manajemen keuangan pondok pesantren agar keuangan pondok pesantren dan lembaga formal maupun non formal didalamnya sehat, dinamis dan akuntabel (Aep Tata Suryana, 2020).

Menurut peneliti berdasarkan hasil temuan peneliti terkait pengalokasian anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'arif Bilae perlu ditingkatkan lagi dengan menggunakan berbagai metode maupun cara dalam pengalokasian anggaran terhadap pemenuhan sarana dan prasarana, mengingat bahwa semua keuangan pesantren tentu harus merata pembagiannya untuk keperluan pesantren termasuk biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Nanang Fattah, 2006). Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Pondok Pesantren dalam pengalokasian anggaran lebih baik diantaranya a) membuat planning anggaran dengan objektif, maksudnya ialah pada saat mempersiapkan anggaran operasional

untuk pesantren, harus memiliki tujuan utama yang akan menjadi inti rencana tahunan. b) membuat rencana prioritas program, dengan maksud merencanakan program-program prioritas dengan detail dan matang. Sebab, kesalahan dalam perencanaan program akan sangat mempengaruhi hasil dan goal yang ingin dicapai. c) membuat analisis biaya dan sumber daya, untuk mendapatkan nilai yang akurat, pengelolaan bisa menerapkan cara seperti ini: menentukan manfaat dari program yang telah ditentukan serta hitung nilai materiil dari semua manfaat tersebut. Menghitung semua biaya, baik untuk program prioritas maupun biaya lain seperti infrastruktur dan perawatan. membandingkan manfaat dan sumber daya yang harus dikeluarkan pada setiap program dan kegiatan. Selanjutnya, evaluasi pengeluaran dan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin tidak ada over cost dalam anggaran. Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidika, harus dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang berasal dari berbagai sumber untuk membiayai pendidikan secara tepat sehingga tidak ada dana yang pengalokasiannya menimbulkan terjadinya ketidakadilan dan agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga perlu dibuat mekanisme pendanaan pendidikan yang tepat sehingga dana yang ada dapat dialokasikan secara adil, merata, efisien dan efektif (Mujayaroh, 2020). Berkenaan dengan paparan diatas dapat dipahami bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas belajar yang dibutuhkan. Maka dalam hal pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah dan pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Dengan adanya perencanaan tersebut diharapkan pemerintah dapat memeberikan dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien (Alimi, 2012).

C. Serapan Anggaran dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Pondok pesantren sebagai suatu Lembaga Pendidikan maka sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan. Dalam menjalankan proses manajemen pembiayaan pondok pesantren menggunakan system. Dalam hal ini system yang dimaksud bagaimana unsur-unsur yang ada dalam pondok pesantren saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen pembiayaan

operasional pesantren merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan pesantren untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren, sistem pembiayaan pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang sangat menentukan dalam pelaksanaan proses pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan (Uliyatul Mukaromah, 2021).

Menurut peneliti berdasarkan hasil temuan peneliti terkait serapan anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Modern Al-Ma'arif Bilae perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan auditing, yang terdiri dari: a) pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. b) pemeriksaan operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Mengimplementasikan prinsip pembiayaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dan yang terakhir memperhatikan pemasukan, pengeluaran dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan pesantren kepada pimpinan pondok pesantren untuk dicocokkan dengan RAB. Laporan keuangan harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada termasuk bukti penyetoran pajak (PPN dan PPH) bila ada. Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan berupa tanda tangan penerima honorarium atau bantuan atau bukti lain yang sah. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggung jawaban keuangan dari komite sekolah.

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan pembiayaan merupakan tindakan pengurusan tentang anggaran atau keuangan, dimana kegiatan yang dilakukan meliputi sumber pendanaan, perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang mengatur tentang keuangan. Seyogyanya pengelolaan yang dilakukan

harus dengan tepat dan cermat dikarenakan pengelolaan pembiayaan merupakan salah satu substansi dalam pendidikan, tanpa pengelolaan yang baik maka akan berdampak pada indikator yang lain misalnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Begitu pula dengan pemenuhan sarana dan prasarana haruslah dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal diantaranya perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, perawatan serta penghapusan sarana dan prasarana.

Implikasi dari penelitian ini sebagai rekomendasi kepada pengelola keuangan yang ada di pondok pesantren modern al-ma'arif bilae secara khusus dan rekomendasi secara umum sebagai khazanah ilmu pengetahuan terhadap pengelolaan pembiayaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana, serta rekomendasi penelitian selanjutnya yang lebih spesifik lagi untuk diteliti sebagai pembaharu, mengingat penelitian ini masih terdapat kekurangan.

Daftar Pustaka

- Aep Tata Suryana. (2020). Pengelolaan Keuangan Pesantren. *Al-Mujaddid, Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 2(2), 3.
- Alimi, D. (2012). School Types, Facilities and Academic Performance of Students in Senior Secondary Schools in Ondo State, Nigeria. *International Education Studies*, 5(3), 44.
- Anak Agung Putu Agung Dan Anik Yuesti. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cv Noah Alethaeia.
- Daryanto dan Mohammad Farid. (2013). *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Gava Media.
- Dedi Supriadi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. PT.Remaja Rosdakarya.
- Dedy Achmad Kurniady. (2011). Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Dasar di Kabupaten Bandung. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(1), 35–36.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2007). *Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah*. Departemen Pendidikan Nasional.
- E. Mulyasa. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Edward Sallis. (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. IRCiSoD.

- Ferdi W.P. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 596.
- Hartati Sukirman. (2010). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. UNY Press.
- Husnu Abadi. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- I Made Laut Mertha Jaya. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant.
- Indah Maharani dan Hade Afriansyah. (2019). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, 1.
- K.A. Rahman. (2012). Peningkatan Mutu Madrasah melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1434.
- Moh Sugandi. (2019). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Mts Al-Ikhlash Campaka. *Manazhim : Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 143.
- Muhajirin. (2012). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Partisipasi Masyarakat. *Educational Management*, 1(2), 170.
- Mujayaroh, R. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur: Journal of Islamic Education*, 1(1), 43.
- Mulyono. (2016). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Nanang Fattah. (2006). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi Mulyani A. (2005). Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 12–23.
- Nusi Nurstalis. (2021). Peran Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Smp Islam Cendekia Cianjur. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 6, 63.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19. (2005). *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Rusydi Ananda. (2017). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. CV. Widya Puspita.
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasinya*. teras.
- Uliyatul Mukaromah. (2021). Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Sumber Dana di Pondok Pesantren Tahfidzul

Qur'an Al-Hasan Babadan Ponorogo. *MA 'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 115.

Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. (n.d.). *Undang –Undang Dasar Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Usman, J. (2017). Urgensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*.

Zusba Muctar, S. O. (2016). Manajemen Pembiayaan Operasional Pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Syaatibi Bontoabaddo Gowa. *Jurnal Diskursus Islam*, 04(3), 582.